



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Edisi 01/ Januari 2018

ISSN : 2085-4862

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA

Utang Rosidin | Agama Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Pembangunan Nasional

Moh Najib | Agama Dalam Tata Kehidupan Bangsa Indonesia

Aden Rosadi | Peran Dan Fungsi Negara :
(Upaya Mencegah Radikalisme Dan Pluralisme Agama)

Fauzan Ali Rasyid | Sinergitas Agama Dan Negara

Ahmad Fathonih | Menata Kerukunan Hidup Umat Beragama
Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

M Alfian Alfian M | Agama Dan Keyakinan Dalam Konstitusi
Dan Masalah Kebangsaan Dewasa Ini

Firdaus Syam | Agama Sebagai Solusi Pembangunan (Revolusi)
Mental Dan Kelembagaan

Aris Munandar | Konflik Agama Dan Transformasi Struktural:
Membangun Kebijakan Pembangunan Agama Yang Inklusif

Tohadi | Kedudukan Agama Dan Kepercayaan
Pasca Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016:
Suatu Catatan Kritis

Asep A. Sahid Gatara | Haluan Negara Dan Ketuhanan:
Memperkuat Tuntunan Penyelenggaraan Negara



PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA

Badan Pengkajian MPR RI

2018

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., M.M.
Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
DR. Hidayat Nur Wahid, M.A.
DR. (H.C.) Oesman Sapta

Pengarah : DR. Bambang Sadono, S.H., M.H.
DR. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M.
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Tb. Soenmandjaja

Penanggung Jawab : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini

Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Agip Munandar, S.H., M.H.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan;
Muhammad Reza

Pengumpul Bahan : M. Haris Purwa Priyambada; Riswandi; Endang Ita; Rindra
Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Bayu Nugroho; Widhi Aditia Putra; Kartika
Lestari Sianipar; Elias Petege; Wafistrietman Corris; Rani Purwati Kemala Sari;
Wasinton Saragih

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Kata Pengantar Redaksi	III
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	VII
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	IX
Agama Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Pembangunan Nasional - Utang Rosidin	1
Agama Dalam Tata Kehidupan Bangsa Indonesia - Moh Najib	11
Peran Dan Fungsi Negara : (Upaya Mencegah Radikalisme Dan Pluralisme Agama) - Aden Rosadi	33
Sinergitas Agama Dan Negara - Fauzan Ali Rasyid	45
Menata Kerukunan Hidup Umat Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia - Ahmad Fathonih	57
Agama Dan Keyakinan Dalam Konstitusi Dan Masalah Kebangsaan Dewasa Ini - M. Alfian Alfian M.	65
Agama Sebagai Solusi Pembangunan (Revolusi) Mental Dan Kelembagaan - Firdaus Syam	75
Konflik Agama Dan Transformasi Struktural: Membangun Kebijakan Pembangunan Agama Yang Inklusif - Aris Munandar	87
Kedudukan Agama Dan Kepercayaan Pasca Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016: Suatu Catatan Kritis - Tohadi	105
Haluan Negara Dan Ketuhanan: Memperkuat Tuntunan Penyelenggaraan Negara - Asep A. Sahid Gatara	117

AGAMA DALAM NASKAH HALUAN NEGARA SEBAGAI RUJUKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dr. H. Utang Rosidin, SH., MH.¹

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara secara jelas mengatur eksistensi agama dalam kehidupan bernegara, yang diwujudkan melalui bentuk adopsi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan kebijakan publik. Hubungan antara agama dengan negara merupakan hubungan yang bersifat intersectional, yang berarti adanya hubungan persinggungan antara agama dan negara, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak juga sepenuhnya terpisah. Legitimasi agama tetap diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diharapkan menjadi penentu integrasi bangsa, sebagai sumber etika penyelenggaraan negara, sehingga akhirnya menjadi haluan bagi pengembangan pembangunan nasional. Nilai-nilai religius diharapkan juga dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan. Keyakinan spiritual yang muncul dari ketaatan kepada agama diharapkan dapat menjadi penentu arah pembangunan yang dapat diandalkan.

Kata Kunci : Agama, Haluan Negara, Pembangunan, Nasional

¹⁾ Sekretaris Umum Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (BAKOMUBIN) Wilayah Jawa Barat, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung, menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum UIN Bandung (2003), S2 Ilmu Hukum Univ.Padadjaran (2009), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Padadjaran (2014). email, utangrosidin@uinsgd.ac.id

A. Pendahuluan

Agama dalam penyelenggaraan negara dipandang sebagai salah satu wadah rohaniah bangsa, yang selalu diharapkan agar senantiasa menjadi penggerak hidup masyarakat sebagai bangsa yang berketuhanan, sebagai bangsa yang menganut falsafah Pancasila. Sejak awal pembentukan negara Indonesia, *the founding fathers* memandang betapa pentingnya aspek-aspek rohaniah bangsa kita. Indonesia dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius, keyakinan terhadap agamanya sangat kuat, sehingga sampai mempengaruhi terhadap norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya.² Nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam khasanah ibu pertiwi dan memancarkan nilai-nilai yang relatif sama dan berlaku sebagai tata kehidupan di seluruh tanah air, dengan rumusan yang tercantum dalam Pancasila.³

The founding fathers telah merumuskan dan akhirnya sepakat menetapkan Pancasila sebagai ideologi nasional, didalamnya tersirat pandangan bangsa yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa, dan Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan tentang jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Hubungan antara agama dan negara dalam praktek kehidupan kenegaraan Indonesia melahirkan dialektika dan polarisasi pandangan yang cenderung berpola dan tidak banyak berubah, sehingga akhirnya melahirkan pemikiran teokrasi, sekularis, komunis, dan moderasi. *Teokrasi* berpandangan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan negara, sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Sekularis* berpandangan bahwa antara agama dan negara tidak memiliki hubungan satu sama lain, adanya pemisahan dan perbedaan antara agama dengan agama. *Komunis* berpandangan bahwa hubungan negara dan agama berdasarkan pada filosofi *materialism dialiktes dan materialism historis*, sehingga akan melahirkan paham atheis, yaitu pandangan yang meniadakan Tuhan. Adapun *moderasi*, adalah pandangan sintesa antara teokrasi dan sekuler, yang beranggapan bahwa antara negara dan agama tidak memiliki hubungan seperti hubungan yang dimiliki teokrasi, dan tidak juga memisahkan antara agama dengan negara seperti paham sekuler. Paham ini berpandangan bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai baik, sementara

negara memiliki kekuatan yang mengejawantahkan tujuan negara. Dengan demikian, hubungan antara agama dengan negara dipertautkan oleh nilai dan sistem yang sama.⁴

Negara Indonesia adalah negara yang secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara, bahkan agama sebagai dasar negara secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan rumusan pasal tersebut, sistem ketetaneagaan Indonesia mengakui adanya kedaulatan Tuhan yang dijadikan sebagai dasar negara, selain itu juga menganut adanya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia.⁵

B. Agama Sebagai Penentu Integrasi Bangsa

Indonesia yang sejak awal kemerdekaan merumuskan negara sebagai suatu negara yang integralistik, tentunya melakukan upaya untuk memperkuat integrasi bangsa dan negara. Upaya untuk memperkuat integrasi bangsa dan mengurangi munculnya perselisihan dan konflik dalam masyarakat, revitalisasi ideologi perlu mendapatkan penekanan sebagai

bagian dari penguatan wawasan kebangsaan. Hal ini dilakukan diantaranya melalui perumusan operasional ideologi Pancasila yang lebih akademik dan sekaligus lebih fleksibel serta sosialisasi Pancasila baik dalam pendidikan formal maupun dalam masyarakat.

Sejak awal perumusan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia diorientasikan terciptanya perdamaian dengan mengedepankan kompromi dalam proses pembahasannya, khususnya dalam perumusan Pancasila pada sila pertama, yang diformulasikan menjadi Ketuhanan Yang Mahas Esa. Pancasila diusulkan dan kemudian diterima sebagai bentuk kompromi antara kelompok yang menginginkan berdirinya sebuah negara agama dengan kelompok yang menginginkan sebuah negara sekuler, sehingga formulanya diupayakan agar dapat memuaskan kedua kelompok, meskipun kedua kelompok tidak sepenuhnya merasa puas dengan rumusan tersebut.⁶

Munculnya era reformasi, yang sejak awal mendukung kebebasan, mendorong warga negara untuk mengekspresikan pendapat, aspirasi dan kepentingan mereka secara bebas dan terbuka, termasuk ekspresi ideologi yang pada masa Orde Baru sangat dibatasi atau ditekan. Di antara ekspresi itu ada tindakan

² Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2010, h. 23

³ Soemarmo Soedarsono, *Nation and Character Building di Bumi Indonesia*, NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, No. 23, 2012, h. 34

⁴ Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007, h. 175-177

⁵ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Kita*, Jakarta, Aksara Baru, edisi ke-6, 1987, h. 7-8.

⁶ Dodik Ariyanto, *Mengenal Lebih Dekat Proses Lahirnya Konstitusi dan Ideologi Negara Republik Indonesia*, NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, No. 23, 2013, h.103

yang berlebihan sehingga melahirkan konflik, perselisihan dan kekerasan dalam masyarakat, baik yang berlatarbelakang politik, ekonomi, etnis, agama dan sebagainya. Sebagai masyarakat majemuk, sejak awal bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat beragama yang moderat dan toleran, dan bahkan menjadi contoh toleransi beragama di dunia. Namun di era reformasi ini, peristiwa konflik antar-warga, termasuk yang berlatarbelakang agama, justru semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa Orde Baru.

Muncul pula ekspresi kebebasan dalam bentuk kekerasan dan radikalisme, yang justru mengganggu harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bangsa dan negara dan bahkan dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebhinnekaan. Hubungan interaksi dalam masyarakat yang mejemuk ini tentunya tidak mudah untuk mewujudkan harmoni dan kedamaian, karena masing-masing kelompok bisa memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda dan bisa berimplikasi kepada munculnya persaingan. Apalagi jika masing-masing kelompok mengembangkan politik identitasnya dan egoisme kelompoknya dengan mengatasnamakan ekspresi kebebasan dan hak-hak asasi manusia.

Perbedaan, perselisihan, dan konflik sebenarnya hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi jika

konflik itu berkembang menjadi kekerasan, maka hal ini menunjukkan bahwa sebagian bangsa Indonesia masih belum beradab, dan hal ini bahkan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia.

Kerukunan antar umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke waktu. Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kerukunan hidup antar umat beragama merupakan prakondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia.

Seluruh umat beragama harus memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai religius harus dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia. Keyakinan spiritual yang muncul dari ketaatan kepada agama akan dapat menjadi motor pembangunan yang dapat diandalkan, sementara nilai-nilai moral pembangunan itu sendiri tidak pernah dilupakan.⁷

Keragaman agama, di satu sisi memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Namun di sisi lain keragaman agama dapat juga berpotensi sumber konflik. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus Cikesik, Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya masih menyisakan masalah.

Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif, terutama dari segi yuridis. Hal ini penting demi tercapainya kedamaian kehidupan umat beragama di Indonesia. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan bidangbidang lainnya. Bangsa Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang cinta damai dan diikat oleh rasa persatuan nasional untuk membangun sebuah negara yang majemuk. Persatuan ini tidak lagi membedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya.

Peran UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pemersatu bukan berarti UUD 1945 menghilangkan atau menafikan adanya perbedaan yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia, pandangan tokoh-tokoh bangsa dan merupakan

hasil musyawarah berbagai pandangan.⁸ Sebagai pemersatu, maka UUD 1945 harus mengakui, menghormati, dan memelihara setiap bentuk keragaman, termasuk keberagaman agama agar tercipta kerukunan antar umat beragama, sehingga dituangkan dalam Pasal 28E mengenai kebebasan beragama dan beribadah, Pasal 28J mengatur mengenai batasan dalam beribadah agar tercipta ketertiban, sedangkan dalam Pasal 29 memberikan jaminan dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

Pemerintah adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, salah satu upaya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang.
- 2) Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

⁷⁾ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 113

⁸⁾ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, PT. Alumni, 2006, h. 76

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Umat Beragama.

- 3) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- 4) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional dalam proses demokratisasi yang beradab melalui upaya penguatan wawasan kebangsaan warga, terutama dilakukan oleh MPR, melalui penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinnekaan. Upaya ini dilakukan dengan revitalisasi ideologi sebagai suatu platform bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, sementara tingkat pendidikan dan kesejahteraan mereka secara umum masih rendah yang berakibat terhadap rendahnya tingkat kesadaran akan harmoni dan integrasi bangsa. Dalam revitalisasi ini diperlukan rumusan ideologi Pancasila yang lebih akademik dan sekaligus lebih terbuka, sehingga penafsiran Pancasila tidak akan disakralkan seperti pada masa lalu.

Sebagai upaya untuk penguatan wawasan kebangsaan inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif dalam revitalisasi ideologi Pancasila. Hal ini berarti bahwa agama semestinya menjadi faktor *integratif* (pemersatu) dan bukan sebaliknya sebagai faktor *disintegratif* (pemecah belah) bangsa. Dengan fungsi ini nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi modal sosial bagi harmonisasi dan integrasi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi ini, diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan memperhatikan kondisi obyek masyarakat Indonesia yang multi-etnik, multi-agama dan multi-kultural.

Pemahaman semacam ini akan menjelma menjadi sikap keberagamaan yang moderat dan toleran terhadap kemajemukan, bukan sikap keberagamaan yang berwatak absolutis dan radikal. Sebagai konsekuensinya adalah adanya upaya-upaya *counter* (kontra) radikalisme, baik melalui pendekatan keamanan dan hukum maupun pendekatan agama (*teologis*). Pendekatan keamanan atau hukum saja tidak cukup, terutama bagi radikalisme ideologis, karena para pelakunya justru merasa bangga dikenakan hukuman dan menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Oleh karenanya, di samping pendekatan keamanan dan hukum, juga perlu dilakukan pendekatan teologis yang menekankan pemahaman ajaran agama yang mengajarkan harmoni dan kedamaian.

C. Agama Sebagai Sumber Etika Penyelenggara Negara

Negara mengakui eksistensi lembaga-lembaga keagamaan dalam negara dan masyarakat. Hanya saja, terdapat perbedaan visi dan aspirasi di kalangan warga tentang sejauh mana keterlibatan agama itu dalam negara. Dalam konteks ini, orientasi warga negara tentang keagamaan dalam konteks kehidupan negara cukup bervariasi, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk.

Pertama, agama sebagai ideologi, yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang hendak menjadikan agama sebagai ideologi negara, implementasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Orientasi kelompok ini pada agama lebih besar daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan, sehingga ia akan bisa menimbulkan dilema jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Apalagi secara umum kelompok ini memiliki sikap yang absolutis dan eksklusif dalam beragama, di samping kadang-kadang melakukan politisasi agama untuk mendukung cita-cita tersebut.

Kedua, agama sebagai sumber etika-moral (*akhlak*), yang didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religio-ethics*), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara

yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika-moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang kadang-kadang bisa sangat subyektif atau sangat temporal.

Ketiga, agama sebagai sumber ideology, yakni menjadikan agama sebagai sub-ideologi atau sebagai salah satu sumber ideologi Pancasila. Pandangan kelompok ini lebih realistis dan moderat, karena meski orientasi ini berupaya melaksanakan etika-moral serta hukum agama atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi terbuka dan fleksibel, maka agama dituntut untuk memberikan kontribusi dalam penjabaran konsep-konsep operasional di berbagai bidang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia. Dalam hal inilah nilai-nilai dan norma-norma agama menjadi input dan legitimasi bagi pembentukan dan penguatan etika-moral serta sistem nasional dan kebijakan publik. Di samping itu, orientasi ini mendukung pluralisme dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan bangsa ini, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.

Penguatan etika-moral (*akhlak*) melalui agama dalam penyelenggaraan bangsa dan negara sangat dibutuhkan, terutama ketika kondisi akhlak bangsa ini secara umum

masih sangat lemah, seperti maraknya kebohongan, korupsi, penipuan, kekerasan, radikalisme, pemerkosaan, egoisme, keserakahan dan sebagainya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan politik, hukum dan birokrasi.⁹

Agama adalah suatu unsur mengenai pengalaman yang dipandang mempunyai nilai tertinggi, yaitu pengabdian kepada suatu kekuasaan, yang dipercayai sebagai suatu yang menjadi asal mula segala sesuatu, kemudian yang menambah dan melestarikan nilai-nilai serta sejumlah ungkapan yang sesuai dengan urusan pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara yang simbolis maupun melalui perbuatan yang bersifat perseorangan atau secara bersama-sama.¹⁰

Ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma tersebut mengacu kepada pencapaian nilai-nilai luhur guna pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan sosial dalam upaya memenuhi ketaatan kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan nyata banyak dijumpai penyimpangan atau perubahan dari konstataasi di atas, baik secara individual maupun kolektif.¹¹

D. Penutup

Pentingnya agama dalam pembangunan nasional tidak hanya sebagai sekedar pembinaan akhlak masyarakat yang menentukan terhadap tingkah laku dalam suatu bangsa, tetapi juga sebagai pengarah dan pendorong masyarakat untuk berperan aktif bersama-sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara dalam konstitusi, yakni pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan manusia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, adil, dan makmur.

Arah pembinaan kehidupan beragama hendaknya ditujukan untuk memperkuat dan memperkokoh persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Memantapkan Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa sebagai penentu integrasi bangsa, sumber etika penyelenggaraan negara, serta terus memperjelas dan mempertegas peranan agama sebagai haluan negara dalam pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Thaba, 1996, *Islam dan Negara*, Jakarta, Gema Insani Press
- Azyumardi Azra, 2002, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta, Kompas
- Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Donald Eugen Smith, 1970, *Religion and Political Development*, Boston, Little Brown and Company
- Dodik Ariyanto, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Proses Lahirnya Konstitusi dan Ideologi Negara Republik Indonesia*, NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, No. 23
- Djalaluddin dan Ramayulis, 1998, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Kalam Mulia
- Edward Aspinall and Marcus Mietzner (eds.), 2010, *Problems of Democratizations in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Singapore: ISEAS
- Effendi Bahtiar, 1998., *Islam dan Negara*, Jakarta, Paramadina
- Edward Aspinall and Marcus Mietzner (eds.), 2010, *Problems of Democratizations in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, ISEAS, Singapore
- Faisal Ismail, 1999, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Frans Magnis Suseno, 1997, *Mencari sosok demokrasi, sebuah telaah filosofis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Ismail Sunny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Kita*, Jakarta, Aksara Baru
- Harold Chrouch, 2010, *Political Reform in Indonesia after Soeharto*, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies
- Inu Kencana Syafei, 2010, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Jalaludin Rahmat, 2001, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- _____, 2004, *Psikologi Agama; Sebuah Pengantar*, Bandung, PT. Mizan Pustaka.
- Masdar Farid Masudi, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet
- M. Syafi'i Anwar, 1995, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia*, Jakarta, Paramadina
- Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press.

⁹ Edward Aspinall and Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratizations in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, ISEAS, Singapore, 2010, h. 17.

¹⁰ Inu Kencana Syafei, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, h. 120

¹¹ Djalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Kalam Mulia, 1998. cet. Ke-4. h.129

Peter L. Berger et al. , 1999, *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*, Ethics and Public Policy Center, Washington DC

Soemarno Soedarsono, 2012, *Nation and Character Building di Bumi Indonesia*, NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, No. 23

Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, PT. Alumni

Wahyudi Kumorotomo, 2013, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Umat Beragama